

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin meningkatnya pertumbuhan pada teknologi informasi saat ini sebanding juga pesatnya perkembangan internet di negara Indonesia. Negara Indonesia telah menempati peringkat ke 6 di dunia dengan jumlah pengguna internetnya sebesar 83,7 juta jiwa dan telah diprediksi akan terus mengalami lonjakan di setiap tahunnya [1]. Internet telah dijadikan sarana komunikasi bagi manusia untuk menyebarkan informasi dengan cepat dan memberikan kemudahan bagi manusia dalam mengakses informasi [2].

Website merupakan alamat yang terdapat di internet pada suatu halaman *website* yang dibuat menggunakan html yang dapat diisi gambar grafis, teks, musik, serta video. Desain dari *website* yang dibuat juga harus memperhatikan UI/UX. *User interface* (UI) sangat berpengaruh pada kesan pertama *user* saat mengakses sistem itu. Desain dari *website* yang akan dibangun harus lebih memperhatikan UI/UX. *User interface* (UI) sangat berpengaruh terhadap persepsi pengguna saat membuka sistem itu. Sedangkan, *user experience* dibuat agar sistem sesuai kebutuhan yang bertujuan memberi pengalaman dari *user* yang menggunakan sistem. Pengalaman tersebut diantaranya seperti apa reaksi, pikiran, dan perilaku pengguna saat menggunakan sistem tersebut [3].

Dinkominfo atau Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Purbalingga sudah menerapkan teknologi berbasis *website* yang berguna untuk melakukan pelaporan serta pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan pekerja, pegawai ataupun pihak lain dalam organisasi tempat pelapor bekerja dengan nama *Whistle Blowing System* (WBS) yang menggunakan alamat link wbs.purbalinggakab.go.id. Pemerintah Indonesia sudah berkomitmen untuk mengembangkan sistem tersebut menurut Instruksi Presiden (Inpres) Tahun 2015 Nomor 07 yang berisi aksi untuk mencegah dan memberantas korupsi yang mengatur tentang optimalisasi serta peningkatan

pada efektifitas *whistle blowing system*. *Whistle Blowing* adalah suatu elemen penting bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan integritas publik. Berbagai tindakan yang melanggar aturan dan tidak etis dilakukan oleh para birokrat dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti korupsi, ketidak tepatan dalam mengelola keuangan negara, maladministrasi, dan berbagai keputusan birokrat yang sangat berpotensi mengandung dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan. Sebelum dibuat *whistle blowing system* pelaporan tersebut disampaikan melalui media massa. Namun, jika pelaporan disampaikan pada media massa tidak ada kewajiban untuk dilakukannya investigasi terhadap tindakan tersebut dan pada media massa belum memiliki mekanisme untuk melindungi pelapor yang melakukan pelaporan tindakan melanggar aturan tersebut [4].

B. Tujuan

1. Tujuan Pelaksanaan PKL/KP

Tujuan dari dilaksanakan PKL/KP sebagai berikut :

- a. Mampu memahami bagaimana situasi lingkungan kerja yang sesungguhnya.
- b. Mampu mengukur kemampuan bekerjasama dalam suatu tim.
- c. Mampu meningkatkan softskill dan hardskill dalam diri.
- d. Memperoleh ilmu baru baik dari pembimbing lapangan ataupun pihak lainnya dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga.

2. Tujuan Pembuatan Laporan PKL/KP

Tujuan dari pembuatan laporan PKL/KP sebagai berikut :

- a. Sebagai syarat penyelesaian kegiatan PKL/KP dan penugasan dari mata kuliah Program Studi Teknik Informatika Institut Teknologi Telkom Purwokerto.
- b. Sebagai arsip bagi penulis telah melaksanakan kegiatan praktek kerja lapangan.

C. Ruang Lingkup

PKL/KP yang dilaksanakan di Dinkominfo yang beralamat di Jalan Letkol Isdiman Nomor 17A, Purbalingga Kidul, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah mulai tanggal 08 Agustus 2022 sampai 09 September 2022. Berdasarkan konteks sebelumnya, laporan PKL/KP ini memiliki keterbatasan atau ruang lingkup agar pembahasan tetap fokus dan terbatas. Laporan PKL/KP ini berdasarkan tugas yang diberikan oleh pembimbing lapangan untuk mendesain ulang website whistleblowing system Kab. Purbalingga serta mengupdate UI/UX dan menambahkan semua fitur yang masih belum ada.

D. Aspek Umum dan Kelembagaan

1. Profil Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga

Dikutip dari *website* resmi Dinkominfo Kab. Purbalingga tertulis bahwa untuk mewujudkan implementasi sebuah *e-goverment* menjadi sasaran yang sangat diharapkan di bidang pemerintahan termasuk Kab. Purbalingga. PerDa Kab. Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 yang memuat lembaran daerah Kab. Purbalingga menyebutkan hal tersebut. Tambahan lembaran daerah Kab. Purbalingga Nomor 30 sehingga Pemkab Purbalingga membentuk Dinkominfo.

Bupati dalam bertugas dibantu oleh Dinkominfo dalam menjalankan tugas diantaranya dibidang statistik dan persandian, komunikasi dan informatika. Dinkominfo memiliki beberapa tanggung jawab dalam menjalankan tugas tersebut, antara lain:

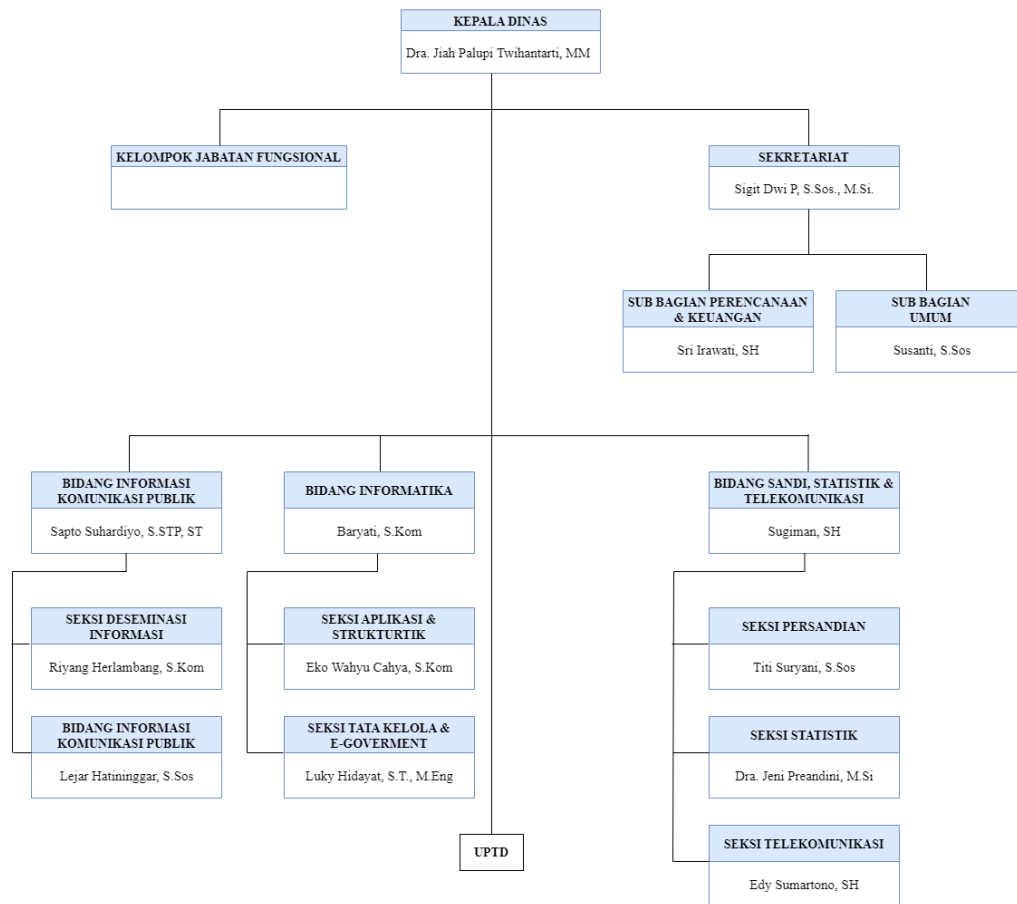
- a. Membuat rumusan kebijakan bidang statistik dan persandian, komunikasi dan informatika diantaranya termasuk humas dan informasi komunikasi publik, statistik dan telekomunikasi informatika dan sandi;
- b. Melaksanakan koordinasi kebijakan bidang statistik dan persandian, komunikasi dan informatika diantaranya termasuk humas dan informasi komunikasi publik, statistik dan telekomunikasi informatika dan sandi;

- c. Penerapan kebijakan di bidang statistik dan persandian, komunikasi dan informatika diantaranya termasuk humas dan informasi komunikasi publik, statistik dan telekomunikasi informatika dan sandi;
- d. Melaksanakan evaluasi serta pelaporan bidang statistik dan persandian, komunikasi dan informatika diantaranya termasuk humas dan informasi komunikasi publik, statistik dan telekomunikasi informatika dan sandi;
- e. Melaksanakan fungsi kesekretariatan dinas;
- f. Mengendalikan pengelolaan tugas UPTD; dan
- g. Tanggungjawab kedinasan lainnya yang diberikan Bupati.

Dinkominfo Purbalingga yang dapat ditemui di Purbalingga Kidul di Jalan Letkol Isdiman Nomor 17A. Kec. Purbalingga, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah dengan nomor kantor: (0281) 8902091 dan email: dinkominfo@purbalinggakab.go.id.

2. Unit-unit Kerja atau Kelembagaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga

Struktur organisasi Dinkominfo Kabupaten Purbalingga menurut Peraturan yang tertera dengan Nomor 90 Tahun 2016 yang berisi Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Tugas Serta Tata Kerja pada Dinkominfo Kab. Purbalingga dapat diperhatikan bagan berikut:



Gambar 1. 1 bagan struktur organisasi Dinkominfo Kab. Purbalingga

E. Metode Penulisan Laporan

Dalam penyusunan laporan PKL/KP, terdapat beberapa metode yang digunakan penulis, diantaranya :

1. Studi Acuan

Studi Acuan merupakan metode dimana penulis mengkaji beberapa materi dari berbagai sumber yang digunakan, seperti jurnal, buku, internet untuk mempermudah penulis dalam menyusun laporan PKL/KP.

2. Wawancara (Interview)

Metode wawancara dilaksanakan lewat tanya jawab kepada pembimbing lapangan secara langsung mengenai sesuatu yang berkaitan dengan website *whistle blowing system* di Kabupaten Purbalingga.

3. Pengamatan (Observasi)

Metode pengamatan dilakukan penulis guna mengamati berbagai hal untuk dijadikan referensi dalam menyusun laporan PKL/KP.

4. Diskusi

Metode diskusi dilakukan penulis guna berkomunikasi secara langsung dengan pembimbing lapangan dan rekan satu tim.

F. Sistematika Penulisan Laporan

Pada saat penyusunan laporan kerja praktek/ praktek kerja lapangan terdapat sistematika dalam penulisan guna memberikan kemudahan dalam pemahaman laporan PKL/KP, sehingga terdapat beberapa bagian untuk menyusun laporan ini, diantaranya:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan berisi tujuan, latarbelakang, metode penulisan, aspek umum kelembagaan dan sistematika penulisan laporan dalam pelaksanaan PKL/KP.

BAB II LANDASAN TEORI

Bagian landasan teori berisi semua aturan yang dijadikan contoh dari penelitian sebelumnya. Teori tersebut diperoleh dari berbagai jurnal yang disesuaikan berdasarkan judul dalam penyusunan laporan PKL/KP.

BAB III PERANCANGAN DAN PEMBAHASAN

Bagian perancangan dan pembahasan berisi kegiatan yang dilakukan pada saat PKL/KP serta pembahasan mengenai proyek yang dilakukan saat PKL/KP yaitu Redesain *User Interface* dan *User Experience* Pada *Website Whistle Blowing System* Dinas Komunikasi dan Informatika Untuk Pelaporan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Purbalingga.

BAB IV PENUTUP

Bagian ini berisi saran serta kesimpulan dari hasil saat pelaksanaan PKL/KP di Dinkominfo Kab. Purbalingga.